

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor : 004/DK/Pokja-Balingtang/9/2012

Tanggal : 11 Oktober 2012

Designing Of Construction Jakenan Research Station - IAERI



**Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Tahun Anggaran 2012**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I. UMUM	3
BAB II. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI.....	4
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA.....	6
A. UMUM.....	6
1. Peserta Kualifikasi.....	6
2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.....	6
3. Larangan Pertentangan Kepentingan.....	6
4. Satu Dokumen Kualifikasi Tiap Peserta.....	7
B. DOKUMEN KUALIFIKASI.....	7
5. Isi Dokumen Kualifikasi.....	7
6. Bahasa Dokumen Kualifikasi.....	8
7. Perubahan Dokumen Kualifikasi.....	8
8. Berlakunya Kualifikasi.....	8
9. Biaya Kualifikasi.....	8
C. PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI.....	8
10. Pengisian Dokumen Kualifikasi.....	8
11. Bentuk Dokumen Kualifikasi.....	8
D. PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI.....	9
12. Pemasukan Dokumen Kualifikasi.....	9
13. Dokumen Kualifikasi Terlambat.....	9
E. EVALUASI KUALIFIKASI	9
14. Kerahasiaan Proses	9
15. Evaluasi Kualifikasi	10
16. Pembuktian Kualifikasi	10
F. HASIL KUALIFIKASI	10
17. Penetapan Hasil Kualifikasi	10
18. Pengumuman Hasil Kualifikasi	10
19. Sanggahan	10
20. Kualifikasi Ulang	11
21. Undangan Kepada Peserta Kualifikasi Yang Lulus	11
BAB.IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	12
BAB.V. FAKTA INTERGRITAS	15
BAB.VI. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	17
BAB.VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI ...	22
BAB.IX. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	27

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Metode Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) yang ditetapkan oleh Bank Dunia.
- B. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- **Jasa Konsultasi** : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri;
 - **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** : kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi;
 - **Pokja ULP** : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- C. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
1. Umum;
 2. Pengumuman Prakualifikasi;
 3. Instruksi Kepada Peserta;
 4. Lembar Data Kualifikasi;
 5. Fakta Integritas;
 6. Formulir Isian Kualifikasi
 7. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
 8. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- D. Pengadaan melalui prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK.
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan prakualifikasi melalui alamat *website* yang tercantum dalam LDK, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- F. Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.

BAB II. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

**Sustainable Management of Agricultural Research and Technology
Dissemination (SMARTD)
Loan IBRD No. 8188-ID**

PENGUMUMAN

**Undangan untuk Memasukkan Pernyataan Berminat
(Request for Expressions of Interest)
Nomor : 434/PL.200/I.8.4/10/2012**

Nama Pekerjaan : Designing Of Construction Jakenan Research Station - IAERI

Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan dana berupa pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB) untuk membiayai Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project dan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari dana pinjaman tersebut untuk membiayai Paket Kontrak Layanan Jasa Konsultan Perencanaan Bangunan Infrastruktur Kebun Percobaan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Designing Of Construction Jakenan Research Station – IAERI)

Layanan jasa konsultan tersebut meliputi: (1) Melakukan perencanaan konstruksi pembangunan Infrastruktur Kebun Percobaan; (2) Membuat perkiraan Biaya (RAB); (3) Membuat Laporan akhir perencanaan; (4) Menyusun dokumen pelelangan. Jangka waktu pelaksanaan yang diinginkan adalah 40 hari kalender sejak kontrak ditandatangani.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian mengundang perusahaan konsultan yang berpengalaman di bidang desain konstruksi yang memenuhi syarat untuk memasukkan pernyataan berminat untuk memberikan layanan jasa konsultansi. Perusahaan konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut. Kriteria dalam penyusunan daftar pendek konsultan (short-list) adalah: (1) Mempunyai pengalaman minimal 8 tahun dalam merencanakan pembangunan gedung, jalan dan jaringan; (2) Mampu menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan;

Perusahaan Konsultan dapat berasosiasi satu sama lain dalam bentuk *joint venture* atau sub konsultan untuk meningkatkan kualifikasi mereka.

Pemilihan Konsultan akan menggunakan metode *Consultants' Qualifications Selection (CQS)* sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Konsultan Bank Dunia

(Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers) edisi January 2011.

Informasi lebih lanjut bagi yang berminat dapat menghubungi:
Pokja ULP Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Jl.Raya Jakenan – Jaken
Km.05 Jaken Pati, Jawa Tengah, atau di www.balingtang.litbang.deptan.go.id.

Pernyataan minat untuk menjadi konsultan dan dokumen kualifikasi harus disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat di bawah ini (secara langsung, email, atau melalui pos) paling lambat diterima oleh Pokja ULP tanggal 17 Oktober jam 14.00 WIB.

[Balai Penelitian Lingkungan Pertanian]
[UP: POKJA ULP Balai Penelitian Lingkungan Pertanian]
[Jl.Raya Jakenan-Jaken Km.05 Jaken Pati Jawa Tengah]
[Kode Pos 59182, Pati]
Tel: 0295-381592
Fax: 0295-381592
E-mail: balingtang@yahoo.com

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

- 1. Peserta Kualifikasi**
 - 1.1 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.*

- 2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan Pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;*
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil kualifikasi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil, meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;*
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi.**
 - 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi;*
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;*
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau*
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.**
 - 2.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.*

- 3. Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 3.1 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.*
 - 3.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 diatas antara lain meliputi:
 - a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu**

badan usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama;

- b. dalam Pengadaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana Pengadaan atau konsultan pengawas Pengadaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pengadaan Terintegrasi.
 - c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Seleksi.
- 3.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP, antara lain meliputi:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- 3.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.

4. Satu Dokumen Kualifikasi tiap Peserta

- 4.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen Kualifikasi.
- 4.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun anggota kemitraan yang lain pada paket Pengadaan yang sama.

B. Dokumen Kualifikasi

5. Isi Dokumen Kualifikasi

- 5.1 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi. Kelalaian menyampaikan

keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta.

5.2 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Kualifikasi.

6. Bahasa Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

7. Perubahan Dokumen Kualifikasi

7.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum.

7.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta.

7.3 Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada adendum Dokumen Kualifikasi.

8. Berlakunya Kualifikasi

Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket Pengadaan yang disebut dalam LDK.

9. Biaya Kualifikasi

9.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.

9.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi

10. Pengisian Dokumen Kualifikasi

10.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi .

10.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta Pengadaan.

11. Bentuk Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.

D. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

- 12. Pemasukan Dokumen Kualifikasi**
- 12.1 Dokumen Isian Kualifikasi dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “DOKUMEN KUALIFIKASI” dan nama paket Pengadaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada Pokja Jasa Konsultansi/Panitia Pengadaan*) dengan alamat yang ditentukan dalam LDK.
- 12.2 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Isian Kualifikasi kepada Pokja Jasa Konsultansi/Panitia Pengadaan*) sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK.
- 12.3 Peserta dapat menyampaikan Dokumen Isian Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja Jasa Konsultansi/Panitia Pengadaan*) sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK, dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.
- 12.4 Dalam hal Dokumen Isian Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket Pengadaan dan alamat Pokja Jasa Konsultansi/Panitia Pengadaan*).
- 13. Dokumen Kualifikasi Terlambat**
- 13.1 Setiap Dokumen Kualifikasi yang diterima oleh Pokja Jasa Konsultansi/Panitia Pengadaan*) setelah batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi ditolak. Pokja Jasa Konsultansi/Panitia Pengadaan*) segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah terima.
- 13.2 Terhadap Dokumen Isian Kualifikasi terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima.

E. Evaluasi Kualifikasi

- 14. Kerahasiaan Proses** Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain hingga hasil kualifikasi diumumkan.

- 15. Evaluasi Kualifikasi**
- 15.1 Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
- a. penilaian Persyaratan Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
 - b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- 15.2 Pakta Integritas [Jika Kemitraan/GSO] telah diisi, ditandatangani dan dilampirkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi.
- 15.3 Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab IX Dokumen Kualifikasi ini.
- 16. Pembuktian Kualifikasi**
- 16.1 Terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek, dilakukan pembuktian kualifikasi.
- 16.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.
- 16.3 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 16.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- G. Hasil Kualifikasi**
- 17. Penetapan Hasil Kualifikasi**
- 17.1 Dari semua peserta yang telah memasukan dokumen kualifikasi dan lulus pembuktian kualifikasi, Pokja menetapkan 3 (tiga) peserta yang terbaik berdasarkan ranking, kemudian akan diundang peserta ranking 1 untuk mengikuti proses selanjutnya.
- 17.2 Apabila peserta ranking 1 tidak layak untuk ditunjuk sebagai pelaksana, akan diundang peserta ranking selanjutnya sesuai dengan urutan.
- 18. Pengumuman Hasil Kualifikasi**
- Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP diumumkan melalui website yang ditentukan dalam LDK dan papan pengumuman resmi.
- 19. Sanggahan**
- 19.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman

hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.

- 19.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- a. penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Metode Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) yang ditetapkan oleh Bank Dunia yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 19.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
- 19.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal.
- 19.5 Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti
- 19.6 Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.

20. Kualifikasi Ulang

- 20.1 Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi.
- 20.2 Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang 3 (tiga), proses seleksi tetap dilanjutkan.

21. Undangan kepada Peserta Kualifikasi yang Lulus

Pokja ULP mengundang peserta ranking 1 dari 3 peserta yang masuk dalam daftar pendek untuk mengambil dokumen pemilihan dan memasukan penawaran, selanjutnya akan diundang ranking 2 jika peserta ranking 1 tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan seterusnya.

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

- A. Lingkup Kualifikasi** Nama Pokja ULP : Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
Alamat Pokja ULP : Jl. Raya Jakena-Jaken Km 05 Jaken, Pati 59182 Telp/Fax : (0295) 381592
Alamat *Website* : <http://balingtan.litbang.deptan.go.id>
- B. Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Loan SMARTD DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0329/018-09.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, **dan apabila dana tidak disetujui maka pelelangan dibatalkan dan calon penyedia barang/jasa tidak boleh menuntut apapun dan meminta biaya ganti rugi.**
- C. Berlakunya Kualifikasi** Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket Pengadaan Perencanaan
- D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi**
Hari : Rabu
Tanggal : 17 Oktober 2012
Pukul : 09.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Sekretariat Pokja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
Jl. Raya Jakena-Jaken Km 05 Jaken, Pati 59182
Telp/Fax : (0295) 381592
- E. Persyaratan Kualifikasi**
1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :
 - a. Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan;
 - b. Penerima kuasa dari direktur utama/Pimpinan Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa).
 - c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau
 - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
 2. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 3. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan

menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) Pengadaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
6. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
 - a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
 - b. penilaian kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan;
7. bagi peserta untuk Pengadaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, maka perjanjian kemitraan/kerja sama operasi wajib di akta notariskan;
8. memiliki SIUJK, SBU Perencana Konstruksi Bidang/Sub Bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan.
9. Memiliki pengalaman pada pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana bangunan gedung/kantor atau bangunan yang sejenis sesuai sub bidang, dengan total bobot penilaian sebesar 50 %, terdiri dari :
 - a. Jumlah paket pengalaman dengan bobot sebesar 25 %;
 - b. Nilai kontrak tertinggi pada paket pengalaman poin a di atas dengan bobot sebesar 25 %;
10. Memiliki Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi keahlian dengan total bobot penilaian sebesar 50 %, terdiri dari :
 - a. Tenaga Ahli 25 %, terdiri dari :
 - 1) Team Leader, S1 Arsitektur/Sipil, pengalaman > 7 tahun, 1 orang tenaga ahli 1 bobot penilaian sebesar 10 %;
 - 2) Ahli Arsitektur, S1 Arsitektur, pengalaman > 5 tahun, 1 orang, tenaga ahli 2 bobot penilaian sebesar 10 %;
 - 3) Ahli Mekanikal/Elektrikal, S1 Fisika Bangunan/Elektro/Mesin, pengalaman > 5 tahun, 1 orang, tenaga ahli 4 bobot penilaian sebesar 5 %;
 - b. Kemampuan Manajerial 25 %, terdiri dari :
 - 1) Team Leader, S1 Arsitektur/Sipil, pengalaman > 7 tahun, 1 orang, tenaga ahli 1 bobot penilaian sebesar 10 %;
 - 2) Ahli Arsitektur, S1 Arsitektur, pengalaman > 5 tahun, 1 orang, tenaga ahli 2 bobot penilaian sebesar 5 %;
 - 1) 3) Ahli Mekanikal/Elektrikal, S1 Fisika Bangunan/Elektro/Mesin, pengalaman > 5 tahun, 1 orang, tenaga ahli 4 bobot penilaian sebesar 10 %;

(Tenaga ahli dan Manajerial dapat disesuaikan dengan kebutuhan /jenis pekerjaan, termasuk dalam penilaiannya disesuaikan)

Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan Pengadaan jasa konsultasi ini, yaitu: Komputer, Printer, Scanner, Digital Camera, Filing Cabinet, Water Pass, Meja Tulis + kursi dll.

BAB V. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____
dan atas nama *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
2. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____
dan atas nama *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
3.*[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan]*
dalam rangka Pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]* dengan ini menyatakan bahwa:
 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses Pengadaan ini;
 3. akan mengikuti proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

(Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk
dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____ [pilih yang
sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka Pengadaan _____ pada _____, (Isi sesuai dengan K/L/D/I) dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses Pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____, _____ 2012

[Nama Penyedia1]

[nama lengkap dan jabatan]

BAB VI. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]

Jabatan : _____

Bertindak untuk

dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/ _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

e-mail : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat _____ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan) [pilih : _____ yang sesuai]	
2. Status [tidak diisi jika Kemitraan/orang perseorangan] :	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat :	_____
No. Telepon :	_____
No. Fax :	_____
e-mail :	_____
4. Alamat Kantor Cabang :	[diisi jika Peserta adalah kantor cabang
No. Telepon :	perusahaan/bukan perusahaan pusatnya. Jika
No. Fax :	Kemitraan maka cukup diberi tanda -]
e-mail :	

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* :	_____ Tanggal _____
Masa berlaku izin usaha :	_____
Instansi pemberi izin usaha :	_____

* Pilih yang sesuai

C. Izin Lainnya

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* :	_____ Tanggal _____
Masa berlaku izin usaha :	_____
Instansi pemberi izin usaha :	_____

(apabila dipersyaratkan)

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi	
a. Nomor Akta :	_____
b. Tanggal :	_____
c. Nama Notaris :	_____
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta :	_____
b. Tanggal :	_____
c. Nama Notaris :	_____

E. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
2. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:	_____
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/Tanggal		
a. PPh Pasal 21	:	_____
b. PPh Pasal 21	:	_____
c. PPh Pasal 25/Pasal 29	:	_____
d. PPN	:	_____
4. Surat Keterangan Fiskal [sebagai pengganti huruf b dan c] Nomor/Tanggal	:	_____

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha/kemitraaan) [cantumkan jika dipersyaratkan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pengadaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [cantumkan jika dipersyaratkan]

No.	Jenis Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi Baik/ruusak	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan [nilai paket tertinggi pengalaman sesuai bidang/subbidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir]

No.	Nama Paket Pengadaan	Bidang/ Sub Bidang Pengadaan	Lokasi	Pemberi Tugas		Kontrak *)		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BAS T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pengadaan yang Sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pengadaan	Sub Bidang Pengadaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK		Kontrak *)		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) %	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____, _____ 2012
[Nama Penyedia]

[rekatkan meterai Rp 6.0000 dan
tanda tangan]

[Nama Lengkap]

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

- A. Data Administrasi
1. Diisi dengan nama badan usaha peserta
 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail badan usaha peserta yang dapat dihubungi.
 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
- B. Izin Usaha
1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
- C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)
1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
 2. Diisi dengan masa berlaku izin.
 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.
- D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha.
 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.
- E. Pengurus
1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.
- F. Data Keuangan
1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
 2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
 - c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir):
 - 1) PPH pasal 21
 - 2) PPH Pasal 23
 - 3) PPH pasal 25/pasal 29
 - 4) PPNPersyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- G. Data Personalia (Tenaga Ahli Tetap)
- Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (sarjana, pasca sarjana), keahlian/spesialisasinya, lama pengalaman kerja, kemampuan manajerial yang dimiliki dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli tetap yang dimiliki.
- H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan bukti kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket Pengadaan, subbidang Pengadaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan Pengadaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket Pengadaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket Pengadaan selama 4 (empat) tahun terakhir.

J. Data Pengadaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket Pengadaan, bidang/subbidang Pengadaan, dan lokasi tempat pelaksanaan Pengadaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres kontrak, prestasi kerja terakhir dan rencana tanggal kontrak.

K. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
KERJASAMA OPERASI (KSO)**

Sehubungan dengan Pengadaan langsung Pengadaan <Nama Pengadaan> yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _____ pada tanggal _____ 2012_, maka kami :

_____ (nama peserta 1);
_____ (nama peserta 2);
_____ (nama peserta 3);
_____ dst

bermaksud untuk mengikuti Pengadaan langsung dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:

- a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan adalah _____
- b. Menunjuk _____ (nama peserta 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
- c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:

_____ [nama peserta 1] sebesar _____% (_____persen)
_____ [nama peserta 2] sebesar _____% (_____persen)
_____ [nama peserta 3] sebesar _____% (_____persen)
_____ dst

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.

4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _____ (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ (nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____.

[Penyedia 1] [Penyedia 2] [Penyedia 3]
(_____) (_____) (_____)

dst
(_____)

Catatan:
Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel.

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui Pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Pokja ULP _____, tahun anggaran _____ maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket Pengadaan tersebut sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab

_____, _____ 2012
[Nama Penyedia]

[rekatkan meterai Rp6.0000 dan
tanda tangan]

[Nama Lengkap]

BAB IX. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
1. penilaian Persyaratan Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
 2. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- B. Penilaian Persyaratan Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) Pengadaan sebagai penyedia jasa konsultasi yang sebanding dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 6. memiliki kemampuan pada sub bidang Pengadaan yang sesuai;
 7. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan;
 8. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
 - a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 8 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan;
 9. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, apabila disyaratkan. Untuk Badan Usaha yang bermitra, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan Pengadaan yang membutuhkan sertifikat atau persyaratan lainnya tersebut;
 10. *bagi peserta untuk Pengadaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, maka Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi wajib di akta notariskan.*
- C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi.
- D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.

- E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
1. pengalaman perusahaan pada Pengadaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan bobot yang ditetapkan dalam LDK :
 - a. Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada Pengadaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 10. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK.
 - b. Dihitung **nilai kontrak tertinggi** pada poin huruf a di atas. Nilai kontrak yang sama dengan atau lebih besar dari pagu anggaran diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat Pengadaan dilaksanakan), nilai kontrak yang kurang dari pagu anggaran diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tertinggi dengan pagu anggaran paket Pengadaan. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK.
 - c. Nilai pada poin huruf a dan huruf b dijumlahkan.
 2. kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada Pengadaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan bobot yang ditetapkan dalam LDK :
 - a. Dihitung **jumlah tenaga ahli tetap** yang memiliki tingkat pendidikan, keahlian/spesialisasi dan pengalaman sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 11. Setiap jenis tenaga ahli yang disyaratkan dihitung nilainya dengan cara memberikan nilai maksimal dan tetap untuk jumlah tenaga ahli yang sama dengan atau lebih banyak dari yang dibutuhkan, untuk tenaga ahli yang jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan dinilai dengan cara membandingkan jumlah tenaga ahli tersebut dengan jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Nilai yang didapatkan dikali dengan bobot jenis tenaga ahli yang telah ditentukan. Nilai yang telah dikali dengan bobot dijumlahkan.
 - b. Dihitung **kemampuan manajerial** tenaga ahli pada poin huruf a di atas. Apabila sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 11 maka diberikan nilai penuh, apabila tidak sesuai maka tidak dinilai.
 - c. Nilai pada poin huruf a dan huruf b dijumlahkan.
 3. nilai pada poin angka 1 dan angka 2 dijumlahkan,
 4. Untuk Perusahaan yang bermitra, penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan terlebih dahulu seluruh pengalaman perusahaan dan kepemilikan tenaga ahli tetap semua perusahaan yang bermitra, kemudian dikalikan dengan bobot-bobot seperti yang tercantum pada angka 1 dan 2 di atas, sehingga dengan adanya kemitraan akan terjadi nilai tambah bagi perusahaan yang bermitra tersebut.
- F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukkan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi.
- G. Apabila tidak ada yang memenuhi Persyaratan Teknis kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- H. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal:
1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan

2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

- I. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Jasa Konsultansi ULP/Panitia Pengadaan*) dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dan/atau melengkapi data yang kurang, namun tidak boleh mengubah substansi Dokumen Kualifikasi.
- J. Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.